

ANALISIS KENDALA MANAJEMEN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI SMK NEGERI SE-TANGERANG SELATAN

PUTUT SAID PERMANA¹, SYAFAATUL HIDAYATI²

^{1,2}Dosen Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang

*dosen01843@unpam.ac.id*¹,

*dosen00861@unpam.ac.id*²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) mengevaluasi keefektifan manajemen praktik kerja industri di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan, (2) menganalisis kendala yang ada pada manajemen praktik kerja industri di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model *discrepancy* serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan pada manajemen praktik kerja industri (prakerin) memiliki kriteria sangat efektif. Aspek pelaksanaan pada manajemen prakerin memiliki kriteria sangat efektif. Aspek evaluasi pada manajemen prakerin memiliki kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan efektivitas manajemen prakerin di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan memiliki kriteria sangat efektif dengan capaian ketuntasan adalah 91,8%. Analisis kendala pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek perencanaan terdapat poin yang memiliki kesenjangan tinggi, yaitu: (1) program prakerin selalu sama dari tahun ke tahun, (2) dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) yang berada di sekitar sekolah tidak selalu relevan dengan program keahlian di sekolah, (3) Pemutakhiran kesepakatan kerja sama antara sekolah dengan DU/DI berupa MoU tidak dilakukan.

Kata kunci: manajemen prakerin; evaluasi program; SMK

PENDAHULUAN

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di setiap negara terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Hal tersebut terjadi sebagai dampak atas perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Kompetensi yang diutamakan juga tidak lagi sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

melainkan juga sikap dan mental yang baik.

Adanya era perdagangan bebas Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) semakin menegaskan pentingnya tenaga kerja yang mampu bersaing pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Oleh karenanya, Indonesia perlu untuk terus meningkatkan kualitas SDM-nya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas

pendidikan terutama yang terfokus pada pendidikan kejuruan. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pembentukan SDM yang unggul. Negara-negara maju sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas mereka dalam pembangunan karena menyadari bahwa SDM yang unggul berawal dari pendidikan yang unggul juga. Harapannya dengan memberikan perhatian lebih kepada pendidikan, maka kualitasnya akan terjamin, sehingga terbentuklah SDM-SDM yang unggul guna mendukung pembangunan nasional.

Sebetulnya, pemerintah Indonesia sendiri sudah mempersiapkan SDM yang kompeten dengan meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemerintah telah menerapkan proporsi jumlah SMA-SMK 30-70 sehingga makin banyak sekolah kejuruan yang dapat dijadikan tujuan untuk melanjutkan pendidikan menengah. Kita ketahui bersama bahwa SMK merupakan jalur pendidikan formal yang memiliki pola pelatihan khusus dalam mengarahkan peserta didik agar menjadi lulusan yang siap kerja. Hal tersebut sesuai dengan isi UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menjabarkan secara spesifik tentang arti pendidikan kejuruan, yaitu: "Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu."

SMK memiliki misi utama untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya sehingga mampu bersaing dan siap untuk memasuki DU/DI. SMK diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, peserta didik di SMK dididik untuk dapat memiliki keterampilan serta sikap professional dalam bidangnya.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan SMK dalam kurikulum SMK (2006: 9) yang menciptakan siswa atau lulusan: 1) memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional; 2) mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mengembangkan diri; 3) menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia industri saat ini dan masa yang akan datang; 4) menjadi tenaga kerja yang produktif, adaptif dan kreatif.

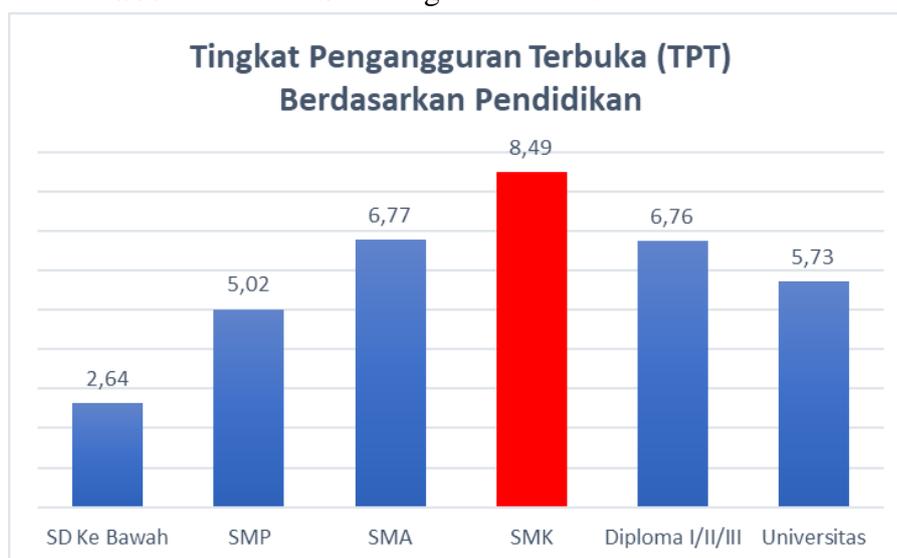
Jika melihat tujuan tersebut, maka sudah jelas bahwa pemerintah mendukung penuh upaya peningkatan kualitas SDM. Namun, pada kenyataannya kualitas lulusan SMK masih perlu banyak peningkatan. Hal tersebut dikarenakan belum semua lulusan SMK mampu memenuhi kebutuhan serta tuntutan lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan yang dirilis per tanggal 05 Mei 2020 memaparkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang,

naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu

orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen.

Tabel 1. Data BPS tentang TPT Berdasarkan Pendidikan



Hal tersebut dalam lingkup lokal juga menjadi perhatian bagi Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Menyikapi laporan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang mencatat angka pengangguran warga mencapai 40 ribu jiwa di tahun 2019, beliau berharap angka tersebut segera turun dengan diadakannya berbagai program pemerintah daerah terkait dengan bursa kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan di salah satu SMK Negeri di Tangerang Selatan, diketahui bahwa implementasi program prakerin masih memiliki kendala. Link and match menjadi

terkendala karena pihak beberapa DU/DI dirasa sering tidak maksimal dalam memberikan kesempatan magang siswa SMK. Hal ini disebabkan karena siswa yang sedang melakukan prakerin dianggap mengganggu kinerja perusahaan. Debyo (2008) menyatakan bahwa “Seringkali didengar keluhan para pemimpin di DUDI yang merasa terganggu dan merasa keberatan ketika institusi mereka ditempati siswa-siswa prakerin.” Hal-hal seperti itulah yang membuat pelaksanaan prakerin di SMK kurang optimal. SMK sebagai penyedia layanan pendidikan tentunya harus selalu memberikan usaha yang maksimal

kaitannya dengan memfasilitasi pembelajaran siswa. Dalam memilih tempat prakerin, sekolah sudah semestinya menyesuaikan dengan fasilitas yang mereka miliki. Analisis kebutuhan harus dilakukan agar siswa betul-betul mendapatkan apa yang penting dalam pengembangan kompetensi mereka nanti. Penyesuaian fasilitas dengan tempat prakerin itulah yang terkadang terhambat dengan terbatasnya kerja sama antara SMK dengan DU/DI. Menyikapi keadaan yang ada tersebut, maka dirasa perlu ada suatu pengamatan kembali terkait implementasi program prakerin di SMK dalam upaya untuk memberikan pandangan yang mungkin dapat berguna bagi peningkatan kualitas program prakerin yang selama ini sudah dijalankan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu evaluasi program untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi prakerin di SMK.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi keefektifan manajemen praktik kerja industri di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan, (2) menganalisis kendala yang ada pada manajemen praktik kerja industri di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggunakan jenis evaluasi program

dengan pendekatan kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Malcolm Probus yang dikenal dengan *Discrepancy Model*. Langkah-langkah evaluasi *Discrepancy* terhadap manajemen prakerin dapat dilihat dalam desain penelitian berikut. Tahap 1 yaitu menentukan kriteria yang diinginkan. Peneliti mengidentifikasi kriteria standar manajemen prakerin dengan merujuk kepada panduan yang dikeluarkan pemerintah dan hasil rancangan sekolah. Tahap 2 yaitu menetapkan kelengkapan program. Peneliti mengidentifikasi apakah kelengkapan program evaluasi manajemen prakerin yang diperlukan sudah sesuai atau belum. Tahap 3 yaitu membandingkan antara kriteria atau standar dengan kenyataan atau pelaksanaan program prakerin dengan kriteria. Peneliti menganalisis ketidaksesuaian kedua hal tersebut. Tahap 4 yaitu menentukan nilai kesenjangan antara kriteria atau standar yang ditentukan dengan perolehan hasil atau kenyataan di lapangan. Peneliti mendapatkan hasil kesenjangan yang didapatkan berupa prosentase kesenjangan. Peneliti akan mendapatkan hasil ketercapaian program. Tahap 5 yaitu melaporkan informasi kesenjangan yang dihasilkan. Informasi yang didapat dari data yang diperoleh akan digunakan sebagai referensi analisis kendala yang terjadi dan menganalisis

faktor yang dapat menyebabkan kendala tersebut terjadi. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah yang dihadapi serta mempertimbangkan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau diperbaiki. Hasil evaluasi dilaporkan sebagai rekomendasi kepada pihak pengambil keputusan atau kebijakan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pihak pengambil keputusan atau kebijakan dapat membuat keputusan atau kebijakan, apakah program dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Peneliti memaparkan hasil dari nilai kesenjangan yang dihasilkan selama penelitian evaluasi manajemen prakerin. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui keberhasilan manajemen prakerin di SMK dan kesenjangan dengan kriteria keberhasilan.

Model evaluasi ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program. Data penelitian ini berupa data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Instrumen penelitian berupa angket tertutup. Angket yang digunakan adalah angket dengan skala Guttman, ditujukan kepada anggota pokja prakerin di setiap SMK. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik persentase.

Adapun langkah-langkah dalam memberikan nilai dilakukan

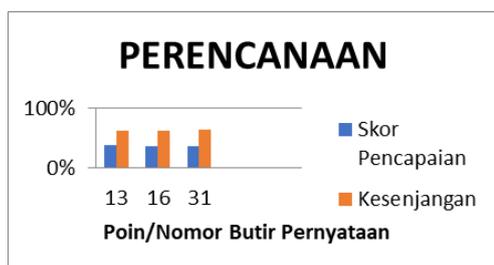
dengan cara sebagai berikut. Pertama memberikan penilaian terhadap setiap ketercapaian indikator pelaksanaan program dengan memberikan skor 1 (satu) untuk setiap skor yang dilaksanakan, skor 0 (nol) untuk indikator pelaksanaan program yang tidak dilaksanakan. Selanjutnya menghitung persentase ketercapaian dengan menjumlahkan kinerja yang dilaksanakan, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kriteria pelaksanaan program sesuai dengan standarnya, kemudian dikalikan 100. Guna mengetahui data hasil konversi kuantitatif ke kualitatif digunakan kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan dari Arikunto & Jabar (2014, p.35) seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kriteria Kuantitatif Tanpa Pertimbangan

Interval Skor	Data Kualitatif
81% - 100%	Sangat Efektif
61% - 80%	Efektif
41% - 60%	Cukup
21% - 40%	Kurang
< 21%	Sangat Kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi pada pokja manajemen praktik kerja industri di SMK Negeri se-Tangerang Selatan adalah termasuk pada kriteria sangat efektif dengan rerata capaian adalah 91,8%. Meski demikian, terdapat 8,2% kesenjangan yang terjadi.



Gambar 1. Grafik Capaian Aspek Perencanaan

Berdasarkan analisis konten pada standar pelaksanaan manajemen prakerin, ditemukan tiga item yang memiliki kesenjangan tinggi, yaitu yang pertama terdapat kesenjangan sebesar 62% pada standar terkait program prakerin selalu sama dari tahun ke tahun, hal tersebut tentunya menjadikan kualitas program prakerin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa kaitannya dengan link and match sekolah dan DUDI. Pokja semestinya mampu membuat suatu strategi dalam menanggapi perkembangan di dunia kerja, baik pada industri maupun perusahaan. Terkait dengan hal itu, David (2011: 6) mengatakan bahwa “Strategy formulation includes developing a vision and mission, identifying an organization’s external opportunities and threats, determining internal strengths and weaknesses, establishing long-term objectives, generating alternative strategies, and choosing particular strategies to pursue.” Dalam merumuskan suatu strategi diperlukan adanya analisis kebutuhan. Penyusunan program prakerin dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan sudah barang tentu akan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam mencapai tujuan prakerin itu sendiri. Maka dari itu, sudah semestinya pokja mempertimbangkan hal tersebut guna meningkatkan kualitas program prakerin.

Kedua, terdapat kesenjangan sebesar 63% pada standar yang membahas relevansi antara kebutuhan DUDI sekitar dengan bidang keahlian yang ada di SMK yang mana belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa pokja kesulitan dalam menentukan tempat prakerin bagi siswa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan kualitas prakerin tidak sesuai harapan, karena pada akhirnya siswa ditempatkan di tempat prakerin yang tidak sesuai bidang keahliannya, sehingga siswa tidak mampu mendapatkan pelatihan yang optimal. Kebutuhan akan DUDI yang relevan dengan program keahlian siswa merupakan salah satu yang utama dalam pelaksanaan prakerin. Tanpa adanya DUDI yang relevan dengan program keahlian, maka siswa tidak dapat melaksanakan kegiatan prakerin. Sejalan dengan hal itu, Alfeld (2015: 26) mengatakan “...The most effective WBL programs, research shows, have a clear link between what is learned in the classroom and what is learned on the job...” Program prakerin yang efektif memiliki hubungan yang jelas antara pembelajaran di kelas dan apa yang dipelajari di tempat kerja.

Ketiga, terdapat kesenjangan sebesar 64% pada standar terkait

pembaruan MoU. Hal tersebut karena kebanyakan isi MoU yang telah disepakati dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perubahan mungkin diperlukan apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan prakerin. Misalnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka kedua belah pihak dapat melihat lagi kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Perencanaan yang baik tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik pula. Zomorrodian (2011: 1125) mengatakan *“The most formidable part of strategic planning that has to do with the implementation. This is a phase that everything that has been planned for needs to be put into action ...”*. Hal yang sama berlaku pula pada manajemen prakerin. Pada aspek pelaksanaan tidak ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan. Secara umum, aspek pelaksanaan memiliki tingkat ketercapaian yang tinggi, yaitu 90%.

Begitu pula pada aspek evaluasi yang memiliki tingkat capaian sebesar 95,4%. Evaluasi pada manajemen prakerin dilakukan sebagai kontrol atas program tersebut. Selain itu, evaluasi pada manajemen prakerin juga diharapkan mampu menganalisis *outcomes* yang dihasilkan sehingga kemudian dapat memainkan peran vital dalam meningkatkan kualitas kegiatan

prakerin selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, Jahanian (2012: 253) pada jurnal internasionalnya tentang evaluasi pendidikan mengatakan bahwa *“Evaluation is a process in which an educational and training procedure is compared with its predetermined goals to find out their fulfillment.”*. Dengan demikian dapat bersama-sama kita pahami pentingnya evaluasi pada manajemen prakerin.

KESIMPULAN

Secara umum efektivitas aspek perencanaan manajemen prakerin di SMK Negeri Setangerang Selatan mencapai kriteria “Sangat Efektif”. Namun, secara khusus hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat tiga butir yang memiliki kesenjangan tinggi pada aspek ini. Ketiga butir yang mengindikasikan adanya kendala ini terkait dengan program prakerin yang monoton dari tahun ke tahun, relevansi bidang kejuruan dengan kebutuhan DUDI di sekitar sekolah, serta pemutakhiran kerja sama yang belum dilakukan. Aspek pelaksanaan dan evaluasi mencapai kriteria “Sangat Efektif” tanpa ada kesenjangan yang signifikan.

Secara komprehensif, hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sangat tinggi bagi pelaksanaan program prakerin di SMK Negeri Setangerang Selatan, yaitu sebesar 91,8% dengan kesenjangan sebesar 8,2%.

Melihat hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokja manajemen prakerin di SMK Negeri Se-Tangerang Selatan secara umum sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, masih adanya kesenjangan yang tinggi di dalam komponen perencanaan mengharuskan pokja untuk berbenah diri. Jika kendala pada program prakerin yang monoton dari tahun ke tahun dibiarkan begitu saja, maka bukan tidak mungkin kualitas prakerin menjadi menurun. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, serta kebutuhan DUDI yang berubah akan menyebabkan ketidaksesuaian program prakerin dengan tujuan yang akan dicapai.

Kendala pada relevansi bidang kejuruan dengan DUDI yang ada di sekitar sekolah dapat menyebabkan pokja kesulitan dalam mendata dan menganalisis DUDI sebagai mitra sekolah. Perencanaan dini terkait DUDI mitra perlu dilakukan pokja untuk menanggulangi kendala yang terjadi. Yang terakhir adalah terkait kerja sama antara sekolah dengan DUDI yang tidak diperbarui. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin di dalam implementasi program prakerin nantinya terjadi pelanggaran-pelanggaran akibat ketidaksesuaian isi kerja sama dengan keadaan pada masa itu.

REFERENSI

- Alfeld, C. (2015). *Building high-quality work-based learning programs for high school students*. Louisville, KY: National Research Center for Career and Technical Education.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Tenaga kerja. Diambil pada tanggal 7 Mei 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>
- David, F.R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases (13th ed)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Debyo W. (2008). Praktik kerja industri. Diambil pada tanggal 2 Februari 2020, dari <http://smkn1-purwodadi.net/v2/>
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan SMK Muhammadiyah 1 Malang. (2006) Malang: Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Malang.
- Merdeka.com. (2019, 10 Juli). Angka Pengangguran Di Tangerang Selatan Mencapai 40 Ribu Orang. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, dari <https://www.merdeka.com/peri-stiwa/angka-pengangguran-di-tangerang-selatan-mencapai-40-ribu-orang.html>
- Suharsimi Arikunto & Cipi Safruddin Abdul Jabar. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi praktisi pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Jahanian, R. (2012). Educational evaluation: functions and applications in educational contexts. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1, No. 2, 2226-3624.
- Zomorrodian, A. (2011). New approach to strategic planning: The impact of leadership and culture on plan implantation via the three cs: cooperation, collaboration and coordination. *Proceedings of ASBBS Annual Conference, Las Vegas, Vol. 18, No. 1, 1121-1132.*
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*